

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Herbert Feith, 1999, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jimly Asshidiqqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Michael L. Balinski dan Young Peyton, 2001, *Fair Representation: Meeting the Ideal of Man, One Vote*, Washington: Brooking Institution Press.
- Miriam Budiardjo, 2000, Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN-FHUI.
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, 2015, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pipit Rochijat Kartawidjaja, 2003, Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih, Jakarta: ELSAM.
- Pipit Rochijat Kartawidjaja, 2004, Matematika Pemilu, Jakarta: INSIDE.
- Ramlan Surbakti. 2011, Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rein Taagepera dan Matthew S Shugart, 2002, *Limitating Frames of Political Games: Logical Quantitative Models of Size, Growth, and Distribution*, California: Center for the Study of Democracy, University of California.
- Yusa Djuyandi, 2017, Pengantar Ilmu Politik, Depok: Rajawali Pers.

JURNAL

- Handley, Lisa, 2007, "Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation. In *Challenging the Norms and Standards of Election Administration*", IFES.

Moch. Nurhasim, 2014, “Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni

Tota Pasaribu, R. Widya S.S, dan Muradi. 2015, “Pemilu Berintegritas (Studi pada Pendaftaran Pemilih terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili dalam Pilkada Samosir Tahun 2015),” *Journal of Governance*, Vol. 3, No. 2, Desember.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi

Kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024